

**HUBUNGAN TINGKAT KONFLIK AGRARIA DENGAN  
TINGKAT EFEKTIVITAS PROGRAM MODEL KAMPUNG  
KONSERVASI (Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan,  
Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat)**

*The Relation Between Agrarian Conflict Level with Effectiveness Of  
Kampung Conservation Model Program Level (Case: Cipeuteuy Village,  
Kabandungan District, Sukabumi Regency, West Java)*

Randi Firman Syah<sup>\*)</sup> dan Murdianto

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,  
Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

\*E-mail: randi.syah80@gmail.com

**ABSTRACT**

*Kampung Conservation Program (MKK) model, which was implemented in 2005 and implemented in villages that border directly or close to the National Park, are Sukagalih, Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, and Cilodor. The MKK program has aspirations to improve the economy level, community independence and also in response to the current agrarian conflict. This research uses a quantitative approach supported by a qualitative approach. The quantitative approach uses a tool in the form of a questionnaire and a qualitative approach that is in-depth interviews using an interview guide tool. The results of this study are the existing agrarian conflicts which are still relatively high but not to the point of violence. The effectiveness of kampung conservation program model is also still relatively low, only in Kampung Sukagalih which is quite high. There is a relationship between agrarian conflicts and the effectiveness of programs, only in the villages with conflicts that can be done with good programs.*

**Keyword:** *Effectiveness, agrarian conflict, kampung conservation Model.*

**ABSTRAK**

Program Model Kampung Konservasi (MKK) yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dan ditujukan untuk kampung yang berbatasan langsung atau dekat dengan Taman Nasional, yaitu Kampung Sukagalih, Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor. Program MKK memiliki cita-cita perbaikan taraf ekonomi, kemandirian masyarakat dan juga sebagai jawaban atas konflik agraria yang dewasa ini terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif didukung pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan alat berupa kuesioner dan pendekatan kualitatif yaitu wawancara mendalam menggunakan alat panduan wawancara. Hasil penelitian ini adalah konflik agraria yang ada mayoritas masih tergolong tinggi meskipun tidak sampai pada kekerasan. Selain itu juga efektivitas program model kampung konservasi masih tergolong rendah, hanya pada Kampung Sukagalih saja yang tergolong tinggi. Terdapat hubungan antara konflik agraria dengan efektivitas program, bahwa hanya pada kampung dengan konflik rendah yang dapat melaksanakan program dengan baik.

**Kata Kunci:** Efektivitas, konflik agraria, model kampung konservasi

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kawasan hutan yang luas, tercatat menurut KLHK (2018) bahwa luas kawasan hutan Indonesia mencapai 120,6 juta hektar atau 63 persen dari luas daratannya dan dengan spesifikasi 68,8 juta hektar sebagai hutan produksi, selanjutnya 22,1 juta hektar sebagai kawasan konservasi (dengan tambahan 5,1 juta hektar dari kawasan konservasi perairan), dan hutan lindung seluas 29,7 juta hektar. Negara dengan hutan yang luas mengakibatkan permasalahan mengenai pengelolaan hutan baik secara alami seperti kebakaran hutan ataupun permasalahan sosial. Permasalahan alami merupakan permasalahan yang sulit dikaji tanpa alat yang sesuai dan modern, dalam hal ini beberapa aspek penyebabnya dikaji oleh BMKG sebagai badan yang berwenang. Permasalahan sosial kerap terjadi akibat adanya interaksi antara masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan ataupun masyarakat yang tinggal dan bermukim di dalam kawasan hutan. Permasalahan tersebut biasa dikenal sebagai konflik. Menurut Hidayat (2011) dijelaskan bahwa sebab-sebab utama yang terdapat atas hilangnya hutan dalam kasus Indonesia ialah orientasi ekspor log yang tidak berkelanjutan, proyek transmigrasi, proyek pembangunan area sawah/padi, perladangan berpindah, hutan tanaman industri, kebakaran hutan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Konflik agraria masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (2018) menjelaskan bahwa sepanjang 2018 terdapat sedikitnya telah terjadi 410 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.117 hektar. Amin (2017) menjelaskan bahwa konflik sumberdaya atau konflik agraria adalah akibat adanya dominasi yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan menguasai yang tidak dominan. Orang-orang yang tidak senang dikendalikan oleh dominasi tersebut pada akhirnya melahirkan konflik baik secara horizontal maupun vertikal dan tidak jarang konflik tersebut menjadi sebuah perlawanan. Sejalan dengan hal tersebut, Jehamat *et al.* (2018) menjelaskan bahwa sumberdaya yang dimaksud memiliki makna yang dalam menurut masyarakat setempat baik secara budaya, ekonomi, politik, bahkan ritual keagamaan sehingga menempatkan sumberdaya lebih dari sekedar transaksi ekonomi saja

Menurut Surono (2012) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan perspektif diantara pihak pemerintah pusat, daerah bahkan masyarakat. Pemerintah pusat lebih mempertahankan kawasan konservasi sesuai dengan pembentukannya, sedangkan pihak daerah dengan konsep "pembangunan" untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan PAD berusaha untuk melepaskan kawasan tersebut dari kawasan hutan negara. Sementara itu masyarakat yang berada di sekitar kawasan merasa berhak untuk dapat menikmati hasil dari kawasan tersebut dalam masa desentralisasi. Jauhnya koordinasi pihak pemerintah pusat dengan tapak atau akar rumput menjadikan pengelolaan bersama masyarakat juga tidak efektif.

Taman Nasional merupakan satu dari tiga kawasan pelestarian alam yang telah dinyatakan dan diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut UU No. 5 Tahun 1990 Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pengelolaan Taman Nasional bertujuan untuk mengklasifikasi area tertentu yang di sesuaikan dengan sistem zonasi (Sawitri dan Heriyanto 2001). Selain itu, landasan hukum Taman Nasional adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Secara tata kelola sumberdaya alam, Gunung Halimun dikelola oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Taman Nasional ditetapkan dengan alasan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati di Indonesia. Menurut Sawitri dan Heriyanto (2001) Taman Nasional Halimun adalah kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati dan tipe ekosistem yang tinggi dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya di Jawa.

Desa Cipeuteuy merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Desa tersebut termasuk ke dalam wilayah yang diajak oleh Taman Nasional untuk melaksanakan program kolaboratif yaitu Model Kampung Konservasi. Program tersebut menekankan bahwa masyarakat haruslah dapat hidup bersama Taman Nasional secara lestari dan sejahtera. Program Model Kampung Konservasi muncul sebagai inisiasi dari Taman Nasional agar kelestarian terjaga, serta perekonomian masyarakat juga bisa berkembang. Undang - Undang Otonomi Daerah No. 22 dan No. 25 tahun 1999 yang melatarbelakangi Model Kampung Konservasi (MKK) di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Inisiasi pelaksanaan Model Kampung Konservasi dimulai sejak tahun persiapan dan pendidikan petugas Taman Nasional. Pada tahun 2005 diadakan persiapan di dua desa yaitu Desa Sirnaresmi (masyarakat adat) dan Desa Cipeuteuy (masyarakat non adat) yang mengasikkan *guideline* Model Kampung Konservasi (MKK). Kemudian Desa Gunung Malang dipertimbangkan sebagai lokasi MKK dengan mempertimbangkan ketelibatan lembaga swadaya masyarakat LATIN sebagai pendamping masyarakat. Implementasi MKK dimulai sejak tahun 2006 yang berkembang dengan sistem kolaborasi bersama dengan Pemda sejak 2008. Pada 2008 Sistem Dukungan Masyarakat Hulu (SISIDUK) untuk *income generating* pun dikembangkan serta replikasi MKK ke Kampung Konservasi pun dilaksanakan dengan berbagi pengalaman ke Taman Nasional lain. Awal mula dilaksanakan program tercatat sebanyak 26 MKK di TNGHS. Oleh karena itu, akibat adanya relasi agraria antara masyarakat dengan BTNGHS maka muncul pertanyaan penelitian mengenai **bagaimana hubungan antara tingkat konflik agraria dengan tingkat efektivitas program model kampung konservasi.**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tingkat konflik agraria di Desa Cipeuteuy?; (2) Bagaimana tingkat efektivitas program model kampung konservasi di Desa Cipeuteuy?; dan (3) Bagaimana hubungan antara tingkat konflik agraria dengan tingkat efektivitas program model kampung konservasi di Desa Cipeuteuy?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis tingkat konflik agraria di Kampung Sukagalih, Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor, Desa Cipeuteuy; (2) Menganalisis tingkat efektivitas Model Kampung Konservasi di Kampung Sukagalih, Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor, Desa Cipeuteuy; dan (3) Menganalisis hubungan konflik agraria dengan efektivitas model kampung konservasi.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, yaitu: (1) Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pembanding dengan penelitian mengenai program MKK/MDK. Selain itu juga mampu menambah khasanah keilmuan dalam konflik agrarian; (2) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang efektif dan diterima oleh masyarakat. Selain itu juga pemerintah diharapkan mampu menekan jumlah konflik khususnya dengan masyarakat disekitar kawasan konservasi; dan (3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sumberdaya dan juga hak-hak masyarakat terhadap kesejahteraan serta pengetahuan mengenai konflik.

## **PENDEKATAN TEORITIS**

### **Konflik**

Menurut Arifandy *et al.* (2015) menjelaskan bahwa konflik merupakan gejala sosial akibat perbedaan kepentingan antar stakeholder. Konflik merupakan hal yang sulit untuk dihindari mengingat setiap individu atau kelompok memiliki kebutuhan ataupun pandangan yang berbeda mengenai suatu hal. Apabila gejala sosial ini tidak dimanajemen dengan baik maka akan

berdampak buruk hingga terjadinya kekerasan. Namun apabila dapat dimanajemen dengan baik maka akan berakhir baik sebagai evaluasi setiap stakeholder yang terkait. Irwandi dan Chotim (2017) berpendapat bahwa konflik merupakan gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Sedangkan menurut Jehamat *et al.* (2018) bahwa konflik mengenai sumberdaya alam terutama tanah berawal dari batas-batas wilayah yang tidak jelas sehingga dalam pengelolaan tanah tersebut terjadi perebutan hak. Sejalan dengan pendapat tersebut bahwa penguasaan lahan oleh negara di kawasan konservasi menggunakan sistem *domain varklaaring*, yaitu siapapun masyarakat yang tidak bisa menunjukkan sertifikat kepemilikan suatu tanah maka menjadi kepemilikan negara. Masyarakat yang semula mengelola lahan tersebut pada akhirnya akan terusir dan menjadi konflik setelahnya.

Konflik memiliki standar dan jenis yang berbeda-beda. Beberapa perkembangan manusia ke arah yang lebih rasional dan modern menjadikan permasalahan konflik semakin rumit. Menurut Moore (1986) menjelaskan bahwa terdapat lima jenis konflik, yaitu: (a) konflik data; (b) konflik kepentingan; (c) konflik structural; (d) konflik nilai; dan (e) konflik hubungan

Menurut Fisher (2001) menjelaskan bahwa Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Pada umumnya memiliki pola-pola terjadinya konflik, yaitu: (a) Konflik laten; (b) Konflik terbuka; dan (c) Konflik permukaan.

### **Konflik Agraria**

Mulyani (2014) Konflik atas sumber daya alam atau sumber daya agraria merupakan salah satu jenis konflik yang kronis dan mengancam negara-negara dunia menjadi negara gagal apabila tidak dapat mengatasinya. Rachman (2013) Konflik agraria merujuk pada pertentangan klaim yang berkepanjangan mengenai siapa yang berhak atas akses pada tanah, sumber daya alam (SDA), dan wilayah antara suatu kelompok rakyat pedesaan dengan badan penguasa/pengelola tanah yang bergerak dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi, dan lainnya; dan pihak-pihak yang bertentangan tersebut berupaya dan bertindak secara langsung maupun tidak menghilangkan klaim pihak lain. Menurut Nurrochmat *et al.* (2012) konflik agraria merupakan persoalan perebutan hak (*right*) dan akses (*access*) terhadap suatu sumberdaya.

Setyowati *et al.* (2008) menjelaskan bahwa konflik pengelolaan sumberdaya alam di tingkat lokal tidak bisa dipisahkan dari pengaruh entitas yang lebih besar seperti kebijakan negara, pasar global atau pengaruh tradisi kolonial dalam pengelolaan sumberdaya alam. Menurut Wiradi (2009) Pada dasarnya, semua jenis konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian/kesenjangan terkait sumber-sumber agraria, khususnya empat bentuk kesenjangan, yaitu: (a) Kesenjangan dalam penguasaan sumber-sumber agrarian; (b) Kesenjangan dalam peruntukan sumber-sumber agrarian; (c) Ketidakserasian antara Persepsi dan Konsepsi mengenai agrarian; dan (d) Hukum dan kebijakan yang saling bertentangan

Terdapat konflik agraria yang kronis, sistemik, dan meluas di Indonesia menurut Rachman (2013), yaitu: (1) Pemberian ijin/hak/konsesi oleh pejabat public (Menteri kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi; (2) Penggunaan kekerasan, manipulasi, dan penipuan dalam pengadaan tanah skala besar untuk proyek-proyek pembangunan, perusahaan-perusahaan raksasa, dan pemegang konsesi lain dalam bidang produksi, ekstraksi, konservasi; (3) Eksklusi sekelompok rakyat pedesaan dari tanah/ wilayah kelola/SDA yang dimasukkan ke dalam konsesi badan usaha raksasa tersebut; dan (4) Perlawanan langsung dari kelompok rakyat sehubungan eksklusi tersebut.

Perlawanan atau resensi merupakan indikasi dari adanya konflik di tengah masyarakat. Menurut teori konflik Scott (2000) terdapat dua jenis resensi atau perlawanan tersebut, yaitu: (a) Resensi/perlawanan terbuka, yaitu perlawanan yang terorganisir, sistematis dan berprinsip. Perlawanan bersifat manifest; dan (b) Resensi/perlawanan tertutup, yaitu perlawanan yang mengindikasikan penolakan terhadap sesuatu yang dipaksakan kepada masyarakat, seperti gosip dan fitnah. Perlawanan bersifat laten.

Shohibuddin (2018) menjelaskan bahwa dewasa ini konflik yang terjadi adalah akibat ketimpangan pada ranah sosio-agraria, yaitu: (a) penguasaan dan pemilikan; (b) penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber agrarian; (c) pembagian kerja dan relasi produksi yang berlangsung di dalamnya; dan (d) serta penciptaan surplus dari ketiga proses ini beserta dinamika akumulasi, ekspansi dan distribusinya.

Adapun sumber-sumber konflik kehutanan, menurut Fuad dan Maskanah (2000) adalah sebagai berikut: (a) Perbedaan persepsi politik dan hukum antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal klaim dan pengakuan hak pada kawasan hutan; (b) Penguasaan dan akses masyarakat lokal tidak diimbangi dengan usaha pengamanan hak; (c) Sektorisme kebijakan negara terhadap sumber daya alam, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang parsial; dan (d) Sistem kelola dengan pemberian konsesi HPH yang ditentukan terpusat menciptakan pertentangan dan benturan nilai-nilai kelestarian sumber daya hutan dengan kepentingan ekonomi.

Pengelolaan sumberdaya alam sejatinya memegang cita-cita berupa manfaat positif, Kartodiharjo (2018) juga menjelaskan bahwa di sisi lain pengelolaan sumberdaya alam juga menimbulkan dampak langsung berupa konflik-konflik yang kemudian berdampak terjadinya kemiskinan dan kerusakan sumberdaya alam. Secara teoritis, konflik terjadi secara simultan akibat: (a) Keberadaan sumberdaya alam semakin langka sementara yang berkepentingan tetap bahkan meningkat (*one social-interest field*); (b) Persoalan persoalan pola perilaku atau interaksi destruktif (*destructive pattern of behavior or interaction*); dan (c) Ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam mengontrol sumberdaya alam (*Unequal control of resources*)

### **Model Kampung Konservasi**

Menurut Effendi *et al.* (2014) menyatakan bahwa program Model Desa Konservasi atau juga disebut sebagai Model Kampung Konservasi adalah pilot project pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang dikembangkan KLHK melalui Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Secara tidak langsung program ini merupakan sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sekitar kawasan konservasi. Awang (2013) Menjelaskan bahwa pandangan konstruksi sosial dengan tegas mengatakan bahwa manusia memainkan peran penting dalam konstruksi sosial atas alam dan lingkungan, masyarakat berinteraksi dengan sumberdaya hutan dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya hutan untuk kepentingan keberlanjutan hidup mereka.

Program Model Kampung Konservasi atau Model Desa Konservasi telah memiliki regulasi dalam pelaksanaannya merujuk kepada Permen KLHK (2017) pada Pasal 25 yang memberikan legal formal terhadap berlangsungnya upaya konservasi yang dilakukan dalam unit Desa yang selanjutnya disebut sebagai Desa Konservasi. Selain itu juga bahwa dalam program ini dibahas mengenai upaya pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat tersebut adalah dengan memberikan akses untuk memanfaatkan zona tradisional yang telah ada sebelumnya di kawasan KSA/KPA.

Menurut Putro *et al.* (2012) menjelaskan bahwa model kampung konservasi merupakan implementasi model desa konservasi di TNGHS dengan nama lain "*The Support for Community-Based Activities*". Kampung konservasi di definisikan sebagai kampung yang di dalamnya bisa melakukan aktivitas perlindungan secara mandiri, mampu menjaga ekosistem, dan secara ekonomi bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Inisiatif pengelolaan kampung dengan tujuan konservasi muncul untuk menjawab tiga isu pokok yakni: (a) Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak sesuai; (b)

Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat; dan (c) Tidak jelasnya tata batas dan ruang kelola.

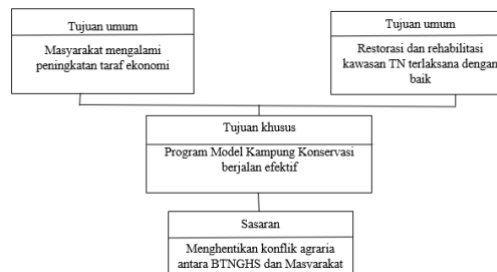
### Analisis Pohon Masalah



Gambar 1 Pohon Masalah

Gambar 1 Pohon Masalah

### Analisis Pohon Tujuan



Gambar 2 Pohon tujuan

Gambar 2 Pohon Tujuan

## PENDEKATAN LAPANG

### Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan pemilihan responden secara survei, sedangkan pendekatan kualitatif adalah wawancara mendalam menggunakan alat panduan wawancara. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan metode purposif sampel, purposif sampel adalah metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti (Effendi dan Tukiran 2012). Populasi yang dimaksud adalah kepala rumah tangga atau individu yang mewakili rumah tangga di Kampung Sukagalih, Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai aspek konflik agraria pada indikator intensitas perlawanan. Serta menjawab pertanyaan mengenai tingkat efektivitas program model kampung konservasi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang meliputi tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya, manfaat langsung keberadaan taman nasional, keterlibatan dalam mkk, dan akses terhadap mkk.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kalandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa barat. Tempat ini dipilih secara purposif dengan beberapa alasan sebagai berikut: (a) Program Model Kampung Konservasi dilaksanakan di Desa Cipeuteuy yang melibatkan lima Kampung; (b) Desa Cipeuteuy berbatasan langsung dengan wilayah TNGHS; (c) Desa Cipeuteuy banyak menjadi percontohan beberapa Balai Taman Nasional di luar wilayah Jawa dalam pengelolaan program Model Kampung Konservasi khususnya untuk Kampung Sukagalih; (d) Penelitian mengenai program Model Kampung Konservasi di Desa Cipeuteuy dewasa ini hanya membahas mengenai kemandirian dan tingkat kesejahteraan,

namun belum meluas untuk menguji tingkat konflik agraria dan efektivitas program model kampung konservasi.

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan yaitu pada bulan Desember 2019 hingga bulan Juni 2020. Jadwal penelitian terlampir pada lampiran 2 Proses penyusunan skripsi dimulai dengan penyusunan proposal penelitian, kolokium, pengambilan data lapang, pengolahan dan analisis data, draft skripsi, uji petik, sidang skripsi, dan revisi.

### **Teknik Penentuan Responden dan Informan**

Penelitian ini menghimpun data dan informasi dari dua subyek, yaitu responden dan informan. Responden merupakan sumber utama data yang akan diuji terkait variabel penelitian yang sudah dijabarkan melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Responden memberikan data mengenai dirinya dan kegiatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sedangkan informan adalah pihak yang memberikan keterangan atau informasi tentang pihak lain dan lingkungannya secara benar dan lengkap untuk mendukung variabel penelitian yang akan diteliti. Responden ditujukan untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif, sedangkan informan khusus untuk mendapatkan data kualitatif.

Populasi pada penelitian ini merupakan masyarakat Kampung Sukagalih, Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor, Desa Cipeuteuy, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 150 Rumah Tangga masyarakat yang tersebar 30 rumah tangga pada Kampung Sukagalih, 30 rumah tangga pada Kampung Cilodor, 30 rumah tangga pada Kampung Cisalimar 1, 30 rumah tangga pada Kampung Cisalimar 2, dan 30 rumah tangga pada Kampung Cisarua, Desa Cipeuteuy, Kabupaten Sukabumi yang dipilih menggunakan teknik purposif sampling. Faturochman (2001) mengatakan rumah tangga pada umumnya mengacu pada kategori spasial di mana sekelompok orang terikat dalam satu tempat yang disebut rumah. Informan dipilih menggunakan teknik *snowball* (bola salju). Teknik tersebut dilakukan dengan cara memilih stakeholder pertama yang biasanya merupakan pejabat formal maupun informal (tokoh) yang kemudian berpindah kepada informan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan informasi dan kelengkapan informasi terhadap variabel yang akan diteliti. Selain itu juga informan dapat memberikan tambahan informasi berkenaan dengan responden. Selain itu terdapat teknik *Focus Group Discussion* (FGD) digunakan untuk menghimpun data kualitatif yang berguna untuk mengurangi ketidakkonsistenan dalam informasi yang disampaikan pada saat wawancara mendalam. Teknik FGD juga berfungsi untuk mendapatkan data kualitatif yang sesuai dengan konsensus forum untuk menetapkan suatu hal yang mungkin berbeda persepsi, seperti tahun suatu peristiwa atau kejadian penting lainnya.

### **Jenis Data dan Teknik Pengumpulan**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh melalui survei, observasi, serta wawancara mendalam yang dilakukan kepada responden maupun informan. Data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah responden dan wawancara mendalam kepada informan dengan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Selain data primer yang dihimpun melalui survei dan wawancara mendalam, observasi juga dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi desa dan masyarakat secara langsung demi pemenuhan dokumentasi pula.

Data sekunder diperoleh melalui berbagai rujukan dan data statistik berupa dokumen-dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian.

1

Tabel 1 Jenis data dan teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data	Data yang Dikumpulkan	Sumber Data	Jenis Data
Kuesioner	- Identitas responden. - Karakteristik rumah tangga responden. - Luas konversi lahan. - Laju konversi lahan. - Tingkat marjinalisasi.	Responden	Primer
Wawancara Mendalam	- Sejarah konversi lahan yang terjadi di lokasi penelitian. - Faktor-faktor penyebab konversi lahan. - Jenis dan pola konversi lahan. - Kondisi yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya konversi lahan.	Responden dan Informan	Primer
Observasi	- Kondisi lokasi penelitian. - Aktivitas masyarakat setelah adanya konversi lahan.	Kondisi <i>real</i> di lapangan, responden, dan informan.	Primer
Analisis Dokumen	- Gambaran umum lokasi penelitian. - Data monografi Desa Cihideung Ilir. - Literatur atau tinjauan pustaka.	Data yang berasal dari pemerintah Desa, buku, jurnal, data BPS, dan hasil penelitian sebelumnya	Sekunder

### Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini terdapat dua jenis data yang diolah dan dianalisis, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diolah menggunakan aplikasi *Microsoft Excell 2016* dan aplikasi *SPSS version 16. for windows*. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan mengenai hubungan konflik agraria dengan efektivitas program Model Kampung Konservasi dilakukan dengan mengolah kuesioner kemudian ditabulasi silang pada *SPSS*, kemudian dianalisis dengan menggunakan *Rank Spearman* untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel berskala ordinal.

Data kualitatif akan diolah melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan yang selanjutnya dipergunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Proses reduksi data dimulai dengan menyaring data hasil wawancara mendalam, observasi dan studi literatur yang telah didapatkan dengan cara penggolongan data hasil wawancara menjadi suatu hal yang dapat dimasukkan ke dalam hasil penelitian. Penyajian data adalah membuat data hasil reduksi menjadi suatu hal yang dapat dimasukkan ke dalam laporan dengan berbagai argumentasi mendasar. Setelah itu dilakukan verifikasi data untuk menarik kesimpulan dari data kualitatif yang sebelumnya sudah melalui tahap reduksi data. Data kualitatif akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memperkuat data kuantitatif.

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada mulanya Desa Cipeuteuy merupakan kampung yang berada di Desa Kabandungan, kemudian Desa Cipeuteuy membentuk desa sendiri akibat pemekaran wilayah yang terjadi pada tahun 1980. Saat ini Secara administratif Desa Cipeuteuy berada di Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Desa Cipeuteuy memiliki batas wilayah sebagai berikut: (a) Bagian utara berbatasan dengan Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor; (b) Bagian selatan berbatasan dengan Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi; (c) Bagian barat berbatasan dengan Desa Malasari, Kecamatan Naggung, Kabupaten Bogor; dan (d) Bagian timur berbatasan dengan Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hal tersebut bahwa Desa Cipeuteuy merupakan desa yang terletak pada perbatasan dengan Kabupaten Bogor. Secara topografi, Desa Cipeuteuy memiliki ketinggian tempat 750-800 Mdp, curah hujan 2600 Mm/Tahun, dataran 500 M, suhu udara rata-rata 24-32 C, jarak Desa ke Kecamatan sejauh 3 Km, jarak Desa ke Kabupaten sejauh 95 Km, jarak Desa ke Ibu



Kota Negara 105 Km. Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) juga sebagian wilayah masuk ke dalam kawasan Desa Cipeuteuy.

Diketahui bahwa Desa Cipeuteuy terdiri dari enam dusun, 19 Kampung, 37 RT, dan 10 RW, yakni Dusun Arendah yang terdiri dari Kampung Babakan dan Parigi dengan 2 RW dan 6 RT, Dusun Cipeuteuy yang terdiri dari Kampung Cipeuteuy dengan 2 RW dan 8 RT, Dusun Cisarua yang terdiri dari Kampung Babakan Atas dan Cisarua dengan 2 RW dan 7 RT, Dusun Lewiwaluh 1 yang terdiri dari Kampung Darmaga dan Cigorowong dengan 1 RW dan 4 RT, Dusun Lewiwaluh 2 yang terdiri dari Kampung Sawah, Cilodor, Kebon Genep dan Gunung Leutik dengan 1 RW dan 4 RT, serta Dusun Pandan Arum yang terdiri dari Kampung Pasir Majlis, Pasir Badak, Cisalimar, Pandan Arum, Pasir Masigit, dan Sukagalih 2 RW dan 8 RT.

Secara umum lahan di Desa Cipeuteuy merupakan lahan pertanian yang digunakan oleh masyarakat yang mayoritas bekerja menggunakan lahan sebagai suatu sumberdaya yang tidak dapat terpisah, baik itu sebagai petani maupun sebagai buruh tani.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konflik Agraria Pra-Model Kampung Konservasi

Kawasan konservasi yang saat ini dikenal sebagai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak telah mengalami beberapa fase perubahan status. Semula ditetapkan sebagai Cagar Alam di bawah pengelolaan pemerintahan belanda dan beralih pengelolaan pemerintah Indonesia Pasca Kemerdekaan, selanjutnya Cagar Alam di bawah pengelolaan Perum Perhutani sebagai hutan produksi, Cagar Alam di bawah pengelolaan BKSDA III, Cagar Alam di bawah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kemudian berubah status menjadi Taman Nasional di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kemudian Menjadi mandiri di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun, terakhir terjadi perluasan dengan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang termasuk didalamnya merupakan eks hutan produksi/lindung.

Perubahan status kawasan dan juga perpindahan pengelolaan tersebut telah melahirkan berbagai permasalahan terutama pada kemampuan masyarakat sekitar mengikuti perubahan tersebut. Tidak jarang bahwa masyarakat masih merasa kebingungan dan tidak memiliki pengetahuan yang baik mengenai status dan fungsi hutan akibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Terutama pada masa peralihan dari hutan dengan fungsi produksi menjadi hutan dengan fungsi konservasi. Pada masa hutan produksi dengan adanya tanaman kayu sebagai komoditas produksi telah melahirkan perambahan besar-besaran. Tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh oknum pengelola hutan produksi itu sendiri. Berikut merupakan tabel periodisasi konflik agraria di Desa Cipeuteuy.

Konflik	Era
Batas-batas wilayah	
Pencurian kayu	
Konflik laten masyarakat dengan polisi hutan	Perum perhutani
Pencurian kayu	
Konflik laten masyarakat dengan BTNGGP	Cagar alam dan Taman Nasional di bawah Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Konflik laten masyarakat dengan BTNGHS	Taman Nasional Gunung Halimun-Salak
Pencurian kayu	

Data: Primer

### Konflik Agraria Setelah Adanya Program MKK

#### Konflik Agraria di Kampung Sukagalih

Pada masyarakat dengan tingkat konflik agraria yang rendah dengan persentase 76.7 persen. Hal tersebut diakibatkan karena masyarakat merasa sudah cukup dan pasrah dengan apapun yang dilakukan selama tidak merugikan masyarakat. Selain itu *power* yang dimiliki oleh masyarakat dengan jumlah penduduk yang sedikit sangat terbatas, sehingga masyarakat memilih untuk menerima apapun yang dilaksanakan dalam program Model Kampung

Konservasi. Selain itu juga sifat masyarakat yang merasa “bersyukur” dan pasrah dengan keadaan akibat adanya budaya masyarakat perdesaan yang menghindari konflik menjadi hal yang menekan adanya perlawanan. Kemungkinan perlawanan oleh masyarakat di akar rumput ini semakin kecil dengan adanya beberapa program bantuan dari dinas terkait. Program bantuan yang bersifat *top down* seperti adanya domba garut yang langsung didapatkan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat merasa memiliki hutang budi kepada penyelenggara program model kampung konservasi dan berimplikasi pada keengganan untuk melawan.

### **Konflik Agraria di Kampung Cisarua**

Konflik agraria yang terjadi di Kampung Cisarua lebih kepada pertentangan fungsi kawasan hutan oleh masyarakat kepada pihak Taman Nasional yang cenderung membatasi ruang pemenuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama semakin meningkat populasi di Kampung Cisarua. Hal ini diperparah bahwa sejarah TNGHS pernah menjadi kawasan produksi Perum Perhutani yang memang cenderung fokus pada pengembangan ekonomi dan selanjutnya masyarakat menganggap bahwa pada era Perum Perhutani mereka lebih bebas untuk keluar masuk kawasan hutan dan menyewa suatu wilayah untuk dikembangkan. Pertentangan antara dua kepentingan antara masyarakat dengan pihak Taman Nasional masih ada hingga saat ini dan banyak yang menganggap bahwa pada era perum perhutani lebih baik dibandingkan dengan era Taman Nasional.

Pertentangan antara dua kepentingan tersebut nampak kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebagai langkah konservasi maupun upaya pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Sehingga dapat dibuktikan bahwa beberapa wilayah hutan di sekitar Kampung Cisarua tidak begitu baik keadaannya akibat adanya beberapa perambahan yang terpaksa dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar wilayah sekitar akibat dominasi yang terlalu besar dari pihak BTNGHS.

### **Konflik Agraria di Kampung Cisalimar 1**

Konflik yang terjadi adalah akibat adanya perbedaan sasaran atau tujuan yang tidak sesuai antara masyarakat (tujuan ekonomi) dengan pihak Taman Nasional (tujuan konservasi). Serupa dengan Kampung Cisarua, bahwa masyarakat merasa terbatas dengan kebijakan yang terlalu kaku dari Taman Nasional sehingga masyarakat merasa sulit mengembangkan perekonomian. Upaya pengembangan ekonomi di luar kawasan hutan oleh Taman Nasional banyak yang tidak berjalan akibat dirasa kurang menguntungkan bagi masyarakat.

Pertentangan antara dua kepentingan antara masyarakat dengan BTNGHS memang sulit untuk dikendalikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kepentingan ekonomi semakin tinggi dan di sisi lain pihak BTNGHS berupaya mempertahankan kawasan konservasi. Meski begitu bahwa dapat terlihat pertentangan ini mengakibatkan tutupan lahan pada kawasan konservasi menjadi terganggu dengan aktivitas masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan. Selain itu juga masyarakat merasa mendapatkan ancaman penjara dari pihak BTNGHS apabila dianggap menyalahi aturan mengenai kawasan konservasi.

### **Konflik Agraria di Kampung Cisalimar 2**

Konflik yang terjadi serupa dengan Kampung Cisarua dan Cisalimar 1 bahwa terdapat pertentangan antara dua kepentingan antara kepentingan masyarakat (ekonomi) dan kepentingan BTNGHS (konservasi). Masyarakat beranggapan bahwa wilayah Taman Nasional adalah milik negara dan masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan dari dalamnya. Sedangkan pihak BTNGHS beranggapan bahwa kawasan konservasi yang didalamnya terdapat keanekaragaman hayati yang tinggi harus mendapatkan perlindungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di masa depan.

Pada kasus ini beberapa masyarakat apabila membandingkan antara era Perum Perhutani dengan era BTNGHS maka lebih menguntungkan pada era Perum Perhutani yang bisa melakukan sewa serta mendapatkan keuntungan dari sisa penebangan tanaman Perhutani. Pertentangan itu juga berdampak pada perambahan kawasan hutan oleh masyarakat sekitar

maupun dari masyarakat luar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan perekonomian. Sebagian masyarakat juga merasa terancam dengan ancaman yang diberikan kepada masyarakat disekitar hutan yang menyalahi aturan konservasi dengan ancaman berupa penjara. Ancaman tersebut yang menyebabkan masyarakat semakin terbatas ruang untuk mengembangkan perekonomian akibat ketakutan yang ditimbulkan.

### **Konflik Agraria di Kampung Cilodor**

Kampung Cilodor memiliki pertentangan tujuan dan sasaran dengan pihak BTNGHS yaitu masyarakat memiliki kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pihak BTNGHS memiliki kepentingan konservasi. Kepentingan tersebut saling bertentangan dengan adanya perebutan hak antara masyarakat dengan pihak BTNGHS.

Perebutan hak tersebut dimaksudkan bahwa suatu kawasan secara formil memang masuk dalam wilayah Taman Nasional, namun masyarakat sebagai warga negara merasa berhak atas manfaat Taman Nasional sebagai pemenuhan ekonomi. Konflik agraria akibat perebedaan kepentingan ini sering kali tidak terlihat sebagai konflik karena memang jarang sekali berhadapan tatap muka dalam pembicaraan konflik antara masyarakat dengan BTNGHS. Konflik dapat dilihat dengan masih adanya perambahan danutupan kawasan hutan yang tidak lagi baik

### **Efektivitas Program Model Kampung Konservasi**

#### **Efektivitas Program MKK Kelompok Kampung Sukagalih**

Berdasarkan indikator tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan, tingkat manfaat langsung keberadaan Taman Nasional, tingkat keterlibatan masyarakat pada program MKK, dan tingkat akses masyarakat terhadap program MKK dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas program model kampung konservasi seluruhnya pada tingkat sedang dan tinggi. Masyarakat menilai bahwa pada tingkat ketergantungan terhadap sumberdaya hutan menjadi menurun setelah adanya program yang ikut membantu dalam hal ekonomi, menjaga kelestarian ekologi, dan juga memperkuat sosial budaya masyarakat. Masyarakat yang menjaga kelestarian hutan bisa mendapatkan manfaat langsung dari sumberdaya hutan. Keterlibatan responden terhadap program juga sangat kuat akibat adanya rasa memiliki dan juga modal sosial yang masih berjalan sehingga memperkuat keterlibatan. Responden juga menilai bahwa kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam program sudah baik dan terbuka untuk seluruh masyarakat sukagalih.

#### **Efektivitas Program MKK Kelompok Kampung Cisarua**

Efektivitas program model kampung konservasi yang dinilai memiliki keefektifitasan yang rendah dengan persentase 63.3 persen. Maka dari itu program MKK di Kampung Cisarua tidak dapat menjadi resolusi konflik agraria yang terjadi di masyarakat sejak sebelum adanya program, tidak meningkatkan perekonomian secara signifikan, juga tidak terjadi proses restorasi dan rehabilitasi kawasan yang baik. Sehingga dalam hal ini tujuan dari masyarakat untuk meningkatkan ekonomi tidak tercapai, dan juga keinginan Taman Nasional untuk melakukan langkah-langkah konservasi tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu bahwa pada Kampung Cisarua, program MKK tidak berjalan dengan baik.

#### **Efektivitas Program MKK Kelompok Kampung Cisalimar 1**

Tingkat efektivitas program model kampung konservasi berada pada tingkat rendah yaitu dengan persentase 76.7 persen. Rendahnya tingkat efektivitas program tersebut menjadikan program tidak berhasil menjadi resolusi konflik, tidak baik dalam langkah restorasi dan rehabilitasi kawasan, serta tidak signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Efektivitas program yang rendah juga akibat konflik agraria yang belum terselesaikan dengan baik sehingga upaya pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Program yang tidak efektif tersebut diakibatkan karena pendampingan yang kurang sungguh-sungguh dan kepercayaan masyarakat terhadap pihak penyelenggara program, yaitu BTNGHS juga tidak begitu baik.

Relasi agraria antara masyarakat dengan pihak BTNGHS juga tidak dibangun dengan baik, sehingga keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sumberdaya hutan tidak terpenuhi dengan baik. Hal tersebut berakibat pada ketergantungan masyarakat tetap tinggi, merasa Taman Nasional tidak lebih bermanfaat dibanding Perhutani, keengganan untuk ikut serta dalam kegiatan program, dan juga merasa tidak memiliki akses yang baik pada kegiatan program.

### **Efektivitas Program MKK Kelompok Kampung Cisalimar 2**

Tingkat efektivitas program model kampung konservasi pada kelompok kampung Cisalimar 2 masih berada pada tingkat rendah dengan persentase 63.3 persen. Hal ini disebabkan manfaat yang dirasa minim oleh masyarakat, bahwa program masih terkesan tidak merata untuk semua masyarakat. Selain itu juga kegiatan program masih minim pendampingan. Akibatnya, masyarakat menjadi enggan untuk ikut serta dikarenakan masyarakat menganggap bahwa program hanya formalitas dari pihak BTNGHS dan tidak benar-benar serius dalam menjalankan kegiatan program.

### **Efektivitas Program MKK Kelompok Kampung Cilodor**

Efektivitas program model kampung konservasi pada kelompok Kampung Cilodor masih berada pada tingkat rendah yaitu dengan persentase 53.3 persen. Efektivitas yang rendah tersebut menyebabkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap program model kampung konservasi masih rendah. Masyarakat menganggap bahwa rendahnya efektivitas program disebabkan dari keseriusan pihak BTNGHS dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan program dan tidak ada keberlanjutan dari pihak BTNGHS setelah adanya kegiatan. Akibat dari hal tersebut dapat terlihat bahwa dampak dari adanya program tidak dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.

### **Hubungan Tingkat Konflik Agraria dengan Efektivitas Program MKK**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat konflik agraria dengan tingkat efektivitas program model kampung konservasi di Kampung Sukagalih dengan nilai korelasi 0.811, Cisarua dengan nilai korelasi 0.459, Cisalimar 1 dengan nilai korelasi 0.352, Cisalimar 2 dengan nilai korelasi 0.380, dan Cilodor dengan nilai korelasi 0.371. Pada Kampung Sukagalih terdapat hubungan dengan tingkat konflik agraria yang rendah dan tingkat efektivitas program model kampung konservasi yang tinggi. Namun, pada Kampung Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor terdapat hubungan antara tingkat konflik agraria yang tinggi dengan tingkat efektivitas program model kampung konservasi yang rendah.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa hanya pada Kampung dengan tingkat konflik agraria yang rendah saja yang dapat mengimplementasikan program model kampung konservasi dengan baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tidak dapat dipisahkan, terlebih dalam melakukan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat lainnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat konflik agraria di Kampung Sukagalih dengan indikator intensitas perlawanan berada pada tingkat rendah sedangkan di Kampung Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor masih mayoritas berada pada tingkat konflik agraria sedang dan tinggi. Konflik yang terjadi pada empat Kampung tersebut adalah perbedaan tujuan antara masyarakat yang memiliki tujuan pemenuhan ekonomi dengan pihak BTNGHS yang memiliki tujuan konservasi. Konflik tersebut juga akibat adanya dominasi dari pihak BTNGHS yang memiliki ancaman penjara bagi masyarakat yang menyalahi aturan konservasi, sehingga terjadi ketakutan ditengah masyarakat. Konflik tersebut termasuk tinggi meskipun tidak sampai pada kekerasan. Namun bentuk-bentuk perlawanan seperti perambahan dan menanam di kawasan Taman Nasional masih terjadi.

Selain itu pada variabel tingkat efektivitas program model kampung konservasi berdasarkan indikator yang ada di Kampung Sukagalih termasuk ke dalam efektivitas yang tinggi. Berbeda

dengan Sukagalih, kelompok Kampung Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor memiliki efektivitas program yang rendah. Rendahnya efektivitas program pada ke empat kampung tersebut diakibatkan karena tidak adanya pendampingan yang kontinyu dan manfaat ekonomi yang dirasa tidak signifikan, sehingga masyarakat enggan untuk mengikuti berbagai kegiatan program.

Tingkat konflik agraria memiliki hubungan dengan tingkat efektivitas program model kampung konservasi pada semua Kelompok Kampung. Terlihat bahwa hanya pada Kampung dengan tingkat konflik agraria yang rendah saja program pemberdayaan dari BTNGHS dapat berjalan dengan baik. Sebaik apapun perencanaan program apabila konflik agraria masih terjadi, maka upaya-upaya penolakan dan perlawanan dari masyarakat akan terus terjadi.

### **Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat direkomendasikan kepada subyek agraria atau beberapa pihak yang terlibat dalam program model kampung konservasi, yaitu: (1) Untuk Menekan Konflik Agraria dan meningkatkan Efektivitas program, maka **Balai Taman Nasional Gunung-Halimun Salak** disarankan untuk: (a) Melakukan pendekatan yang terus intens kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa diperhatikan; (b) Membangun relasi dengan baik bersama masyarakat di Kampung tempat pelaksanaan program demi keberlangsungan program model kampung konservasi; (c) Membuat pemetaan sosial berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, sehingga berbagai kegiatan program yang akan diluncurkan kedepannya dapat akurat dan sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat; (d) Tidak berfokus pada kalimat “dilarang” dalam mengatur hubungan antara masyarakat dengan Taman Nasional, tetapi fokus pada apa yang “bisa dilakukan” oleh masyarakat di Taman Nasional sehingga memberikan kejelasan; dan (e) Menjaga hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat umumnya di Desa Cipeuteuy dan khususnya di Kampung tempat pelaksanaan program; (2) Untuk meningkatkan efektivitas program dan mendapatkan manfaat dari program, maka **Masyarakat** disarankan untuk: (a) Semakin aktif dalam berbagai kegiatan program model kampung konservasi yang dapat berdampak baik bagi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya masyarakat; (b) Terbuka kepada pihak Pemerintah Desa maupun kepada Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak mengenai kendala atau permasalahan dalam program model kampung konservasi; dan (c) Selektif dalam menerima kegiatan program yang dilaksanakan pada program model kampung konservasi, sehingga tidak merusak ekonomi, ekologi, dan sosial budaya yang ada. (3) Pemerintah Desa; (a) Mendukung berbagai upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan di Desa Cipeuteuy; (b) Bekerjasama dan membangun relasi dengan berbagai pihak yang memiliki visi mengembangkan masyarakat di Desa Cipeuteuy dan khususnya di Kampung Sukagalih, Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor; dan (c) Selektif dalam menerima apapun yang dilakukan oleh pihak luar dan memastikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat umumnya di Desa Cipeuteuy dan khususnya di Kampung Sukagalih, Cisarua, Cisalimar 1, Cisalimar 2, dan Cilodor. (4) Peneliti; (a) Meneliti lebih lanjut mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan masyarakat Desa Cipeuteuy dalam hal program model kampung konservasi sehingga dapat melahirkan penelitian yang komprehensif dan holistik terhadap pengembangan masyarakat dan relasi agraria yang ada.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin MAS., 2017. Komunikasi Sebagai Penyebab dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common Vol. 1 No. 2* [internet]. [diunduh 2019 November 13]. Dapat diunduh di: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/common/article/view/573>
- Arifandy MI., Sihaloho M. 2015. Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Solusi Konflik Sumber Daya Hutan. *Sodality Vol. 3 No 2* [internet]. [diunduh 2019 November 13]. Dapat diunduh di: <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=559989>
- Awang SA. 2013. “*Menggugat Ilmu Pengetahuan dan Ekonomi Politik Pembangunan Kehutanan di Indonesia*”. Dalam Kartodihardjo H, Editor. *Kembali ke Jalan Lurus:*

- Kritik Penggunaan Ilmi dan Praktek Kehutanan Indonesia*. Bogor (ID): Forci Development
- Effendi S, Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): LP3ES.
- Effendi AD., Barkey RA., Jamil MH. 2014. Strategi Program Pengembangan Masyarakat Pada Model Desa Konservasi di Taman Nasional Taka Bonerate. *Jurnal Sains dan Teknologi* [Internet]. [diunduh 2019 November 13] dapat diunduh di: <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/67aaf5d08b007fb66a3f4516a8e40650.pdf>
- Fisher S. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Terjemahan. Cetakan I. Jakarta (ID): The British Council Indonesia.
- Fuad F, Maskanah S. 2000. *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor (ID): Pustaka LATIN.
- Hidayat H. 2011. *Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Hal 93-96. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jehamat L., Si PK. 2018. Dinamika Konflik Sosial Berakar Tanah Komunal di Kabupaten Manggarai Flores. *Jurnal Sosio Konsepsia* Vol. 8 No. 1 [internet]. [diunduh 2019 November 14]. Dapat diunduh di: <https://ejournal.kemosos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1544>
- Kartodihardjo H. 2018. “*Krisis Konflik Tenurial-PSDA Indonesia*”. Dalam Cahyono E, Hakim I, Wibowo LR, Ginoga KL, Editor. *Reforma Agraria Sektor Kehutanan: Ragam Masalah dan Tantangan*. Bogor (ID): Ipb-Press
- Mulyani L. 2014. Kritik Atas Penganganan Konflik di Indonesia. *Jurnal Bhumi* Vol 1 No. 39 [internet]. [diunduh 2019 Desember 21]. Dapat diunduh di: <http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/viewFile/176/156>
- Nurrochmat DR, Hasan MF, Suharjito D, Budiaman A, Hadianto A, Ekayani M, Sudarmalik, Purwawangsa H, Mustaghfirin, Ryandi ED. 2012. *Ekonomi Politik Kehutanan: Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*. Jakarta (ID): Indef.
- Putro HR, Supriatin, Sunkar A, Rossanda D, Prihatini ER. 2012. *Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional di Indonesia*. Bogor (ID): IPB Press
- Rachman NF. 2013. Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria Yang Kronis, Sistemik, Dan Meluas Di Indonesia. *Jurnal Bhumi* No. 37 [internet]. [diunduh 2019 Desember 21]. Dapat diunduh di: <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/148/135> [diunduh 2020 Januari 13]
- Sawitri R, Heriyanto NM. 2001. The relationship among potential of natural resources, social, economic and culture of communities in bufferzone of Mount Halimun National Park. *Jurnal Berita Biologi* [Internet]. [diunduh 2019 Apr 18]. Dapat diunduh di: [http://e-journal.biologi.lipi.go.id/index.php/berita\\_biologi/article/viewFile/1085/960](http://e-journal.biologi.lipi.go.id/index.php/berita_biologi/article/viewFile/1085/960)
- Setyowati AB, Maksam J, Maring P, Supohardjo, Nugroho T. 2008. *Desentralisasi Tata kelola Hutan di Indonesia: Tantangan Menyiasati Politik Lokal*. Bogor (ID): Pustaka Latin.
- Scott, James C. 2000. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Shohibuddin M. 2018. *Perspektif Agraria Kritis: Teori Kebijakan dan Kajian Empiris*. STPN Press. Yogyakarta (ID): Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Singarimbun M, Effendi S. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta (ID): LP3ES
- Surono A. 2012. Pengelolaan Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Lokal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 42 No. 1 [internet]. [diunduh 2019 Desember 22]. Dapat diunduh di: <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/282/214>
- Wiradi G. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- [KLHK]. 2018. Data Dan Informasi Pemetaan Tematik Kehutanan Indonesia [internet]. [diunduh 2019 Desember 13]. Dapat diunduh di: [http://appgis.dephut.go.id/appgis/download/1.2.persen20Bukupersen20DEFORRESTASI/BOOKLET\\_PEMETAANpersen20TEMATIKpersen20KEHUTANANpersen20INDONESIA.pdf](http://appgis.dephut.go.id/appgis/download/1.2.persen20Bukupersen20DEFORRESTASI/BOOKLET_PEMETAANpersen20TEMATIKpersen20KEHUTANANpersen20INDONESIA.pdf).
- [UU] Undang Undang Republik Indonesia. 1960. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

- [UU] Undang - Undang No. 22 tahun 1999. Undang - Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- [UU] Undang - Undang No. 25 tahun 1999. Undang - Undang No. 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah